BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

2.1. Sejarah dan Perkembangan PT. PLN (Persero)

2.1.1. Sejarah Singkat PT. PLN

Sebelum menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, PLN di bagi ke dalam beberapa masa yaitu :

A. Masa Penjajahan Belanda

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga lisrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (Gemente) maupun swasta ataupun patungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitun Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gemeenschappelijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuesin – No. 213 Tanggal 31 Desember 1919.

B. Masa Penjajahan Jepang

Pada saat penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

C. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang

Setelah proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal pengelolaan dan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut di mulai adanya nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1961 di bentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPI-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.

Berdasarkan peraturan Mentri PUTL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan Pengumuman PLN Eksploitasi XI Nomor 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Eksploitasi XI di ubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

Kemudian setelah Banten memisahkan dari Propinsi Jawa Barat menjadi propinsi sendiri, namanya diganti menjadi PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN.

2.1.2. Perkembangan Pembangunan Kelistrikan di Jawa Barat

A. Pendahuluan

Listrik merupakan bentuk energi siap pakai yang dikonversi dari bentuk energi primer melalui teknologi. Sejak listrik ditemukan, dengan cepat ia berkembang dan di sukai di seluruh dunia. Sejalan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Listrik menjadi kebutuhan primer manusia, karena semua gerak langkah kemajuan teknologi selalu berhubungan dengan wahana yang tak kunjung henti membutuhkan energi listrik.

Energi listrik merupakan sumber daya yang dibutuhkan pembangunan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung proses industrialisasi, sehingga ketersediaan energi dan tenaga listrik sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Tidak terlebih untuk diakui, listrik selalu dibutuhkan berdekatan dengan jantung kehidupan pada abad sekarang dan yang akan datang.

Di Indonesia, penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum di kelola oleh PLN, mulai dari pembangkit sampai ke *end user* menggunakan jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan opirendah, gardu-gardu induk dan gardu distribusi sampai ke konsumen. Pabrik-pabrik dan perusahaan banyak yang menyediakan pembangkit sendiri (*captive power*) untuk kepentingan sendiri, terutama di lokasi yang masih belum terjangkau jaringan PLN. Namun kondisi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir. Karena keterbatasan dana di satu sisi dan kebutuhan masyarakat di sis lainnya, pemerintah mulai membuka peluang pemodal swasta untuk memasuki bisnis kelistrikan, kebijakan ini seiring dengan pola perkembangan global di seluruh dunia.

Dalam era globalisasi bangsa di dunia lebih mudah berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dibandingkan masa lampau hal ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi di samping itu juga karena bangsa-bangsa di dunia makin lama mengenal satu sama lain bahkan juga banyak terjadi perkawinan antar bangsa.

Begitu juga di bidang bisnis, perusahaan-perusahaan banyak yang berpatungan/bergabung satu sama lain dan berdasarkan pertimbangan bisnis banyak yang mendirikan pabriknya di berbagai negara dan mempunyai pasar di seluruh dunia. Hal ini menimbulkan perusahaan-perusahaan multinasional di samping adanya Perusahaan Asing dari satu bangsa dan yang multinasional beroperasi di Indonesia, juga tuntutan adanya pasar bebas juga tidak bisa di hindarkan.

Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas dalam era globalisasi, penyediaan listrik yang ekonomis dan yang handal oleh PLN makin dituntut oleh para pelanggan PLN, agar mereka bisa bersaing dengan perusahaan listrik swasta dalam hal penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat pemakai tenaga listrik terutama bagi pelanggan industri yang akan mempersiapkan hasil produksinya. Hal ini semua menuntut efisiensi dan pelanggan PLN yang lebih baik, perbaikan efisiensi dan pelanggan PLN memerlukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) PLN mengingat rasa pengabdian kepada negara yang tinggi serta jiwa karsa yang kuat merupakan modal yang penting dalam pengembangan SDM PLN. Untuk menghadapi era globalisasi, harus ditambah dengan wawasan internasional agar SDM PLN mampu bekerja dalam tatanan pasar bebas internasional.

B. Maksud dan Tujuan PT. PLN (Persero)

Dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994, maka PLN yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum)

berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) dengan nama PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero) yang bertujuan :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan :
    a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi.
    b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

2.2. Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

A. Visi

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut PT. PLN (Persero) memegang visi perusahaan :

Abad 21 yang semakin dekat, di warnai perubahan yang semakin cepat, meuntut kompetisi yang semakin ketat. Persaingan tidak lagi terbatas dengan perusahaan sejenis dalam negeri, melainkan juga harus mampu menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, sebagai perusahaan PLN memiliki visi sebagai berikut :

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, unggul, dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi insani.

B. Misi

PT. PLN (Persero) mempunyai misi-misi diantaranya sebagai berikut dibawah ini :

- ✓ Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- ✓ Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- ✓ Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- ✓ Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.3. Bidang dan Kegiatan Usaha

PLN Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkitan dan transmisi. Unit ini "membeli" energinya dan unit PLN lainnya, yang diterima di Out Going Gardu Induk (GI). Sekuruh pulau jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh indonesia di kelola oleh 4 PLN Distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu distribusi tersebut adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. *PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Jawa Barat, Tangerang dengan luas daerah 42.404,36 km^2 dan terdiri dari 23*

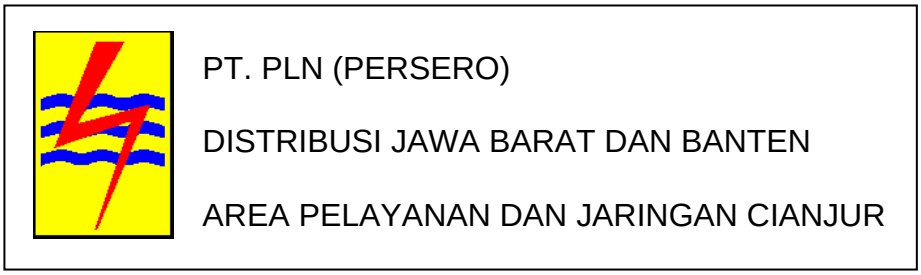
Pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi 6.353 desa dengan jumlah penduduk mencapai 32.644.614 jiwa.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas kegiatannya, memiliki 13 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat, 2 bengkel dan 1 unit pengatur distribusi, yang dibantu oleh 79 Rayon/Ranting, 11 Sub Ranting, 147 kantor jaga dan di bantu oleh 1057 *payment point* (tempat pembayaran rekening).

2.4. Lambang PT. PLN (Persero)

Setiap perusahaan senatiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang itu mempunyai arti yang penting bagi perusahaan tersebut dan merupakan tanda pengenal yang tetap. Bahkan lambang itupun mampu mencerminkan keberadaan perusahaan tersebut.

Ada satu anggapan bahwa lambang, simbol atau logo, mampu menggugah semangat memilki. Banyak pula contoh yang menggambarkan bagaimana sebuah lambang mampu membuat kita merubah sikap. Bahkan sebuah penelitian telah membuktikan bahwa tingkah laku manusia akan berubah sesuai dengan karakter kelompok yang sedang disandangnya dan biasanya karakter kelompok ini dinampakan dalam bentuk simbol/lambang atau logo secara fisik.



Gambar II.1. Lambang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cianjur

Lambang petir/kilat ini telah lama digunakan oleh PLN beserta satuan-satuannya. Pada kenyataannya penggunaan lambang ini tidak semestinya. Penggunaan lambang PLN menurut Surat Keputusan Nomor 013/DIR/1976 adalah :

1. Gambar lambang PLN tercantum dalam suatu bidang dasar datar :
    a. Berwarna kuning keemasan
    b. Berbentuk segi empat, berskala ukuran lebar : panjang = 3 : 4
    c. Tanpa garis pinggir, bila di perlukan penggambaran segi empat pada (b) di gunakan garis pinggir sebagai batas.
    d. Tanpa tulisan Listrik Negara ataupun tulisan-tulisan lain di dalamnya.
2. Gambar lambang PLN terdiri dari :
    a. Petir/kilat yang berbentuk atas tebal dan meruncing di sebelah bawah berwarna merah darah dan memotong/menembus ketiga garis gelombang.
    b. Tiga buah gelombang yang membentuk sinusoida (dua setengah perioda), berwarna biru laut, tersususun secara sejajar dalam arah mendatar, terletak di tengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan.

3. Gambar kilat diartikan sebagai berikut :
    a. Petir/kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya.
    b. Lambang Gelombang dipergunakan dalam lambang PLN karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya, listrik, akuistik, dll.). Kegiatan PLN antara lain mencakup konversi segala macam tenaga (energi).
    c. Tiga buah gelombang sejajar diartikan tiga sikap karyawan PLN dalam melaksanakan tugas negara, bekerja keras, bekerja cepat dan bertindak cepat. Artinya yang lain bahwa pelaksanaan tugas PLN dalam 3 bidang, pembangkitan, penyaluran, dan distribusi tenaga listrik harus serempak.
4. Warna lambang diartikan sebagai berikut :
    a. Warna kuning keemasan melambangkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya kewajiban PLN.
    b. Warna merah darah melambangkan keberanian dan dinamika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran pembangunan.
    c. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta dinyatakan dala Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972.
5. Penempatan tulisan-tulisan yang menyatakan satuan PLN

    Guna menyatakan satuan-satuan PLN pada lambang PLN maka jika di anggap perlu, dapat ditempatkan tulisan-tulisan yang menyatakan satuan-satuan PLN yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada papan nama PLN dicantumkan disebelah kanan lambang tersebut.

b. Pada tanda-tanda peralatan, kendaraan dan sebagainya, disebelah atas lambang dicantumkan satuan induknya (PLN Pusat, Wilayah, Proyek, dsb.) di bawah lambang dicantumkan satuan eselon berikutnya (PLN Cabang, Sektor, dsb.).

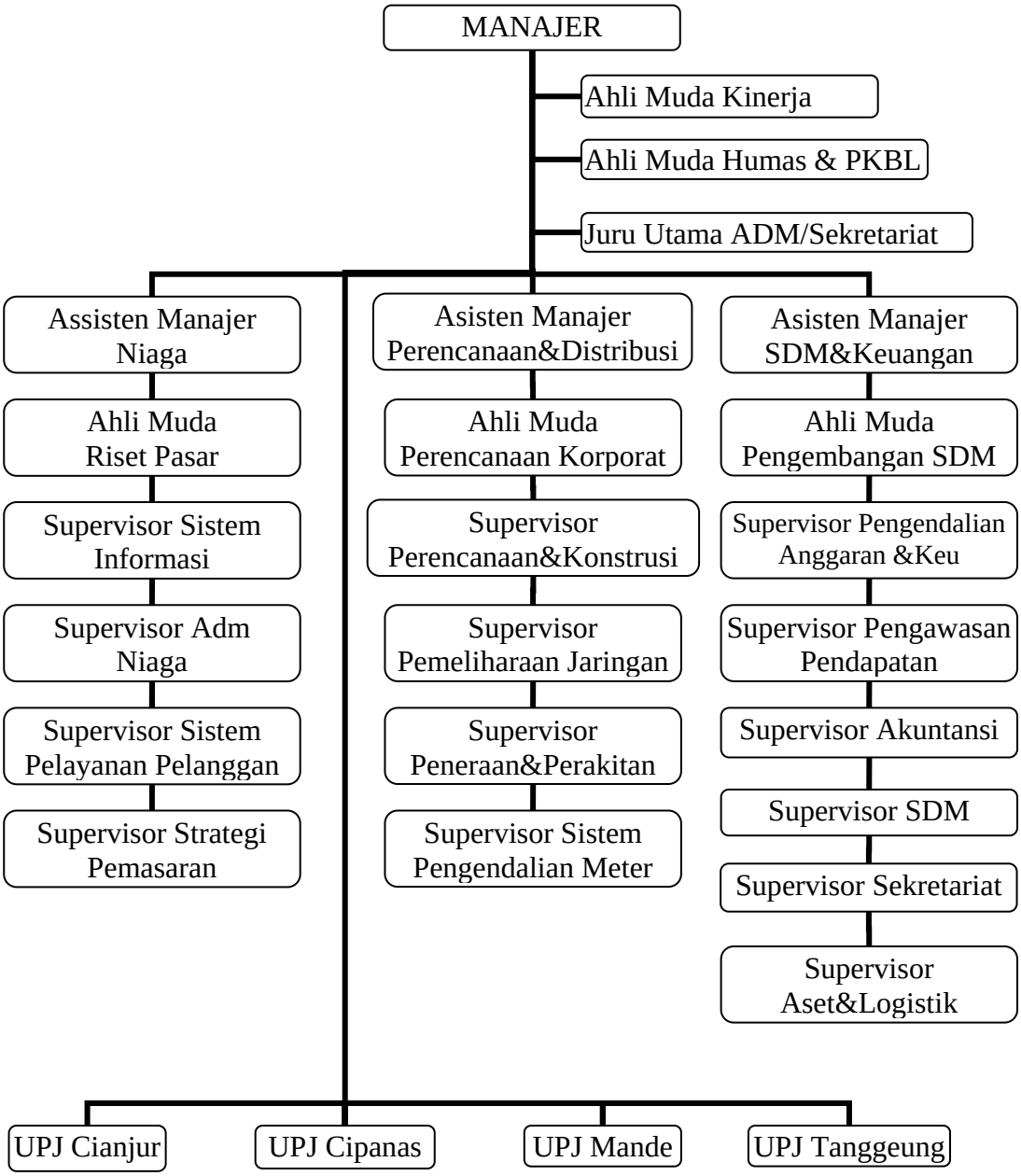
6. Standar bentuk lambang PLN

   Standar bentuk lambang serta ukuran-ukurannya dibakukan seperti tertera pada gambar. Semua lambang dibuat sesuai dengan kelipatan 1/10, 1/51, 1/2,… dst.).

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten

Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cianjur



Gambar II.2. Strutktur Organisasi